

## Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Masyarakat : Studi Kualitatif

### *Implementation of prevention policies to eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics in society: Qualitative Study*

Namora Lubis<sup>1</sup> & Balqis Nurmauli Damanik<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Columbia Asia, Indonesia

Disubmit: 25 Mei 2024; Diproses: 05 September 2024; Diacept: 15 November 2024; Dipublish: 30 November 2024

\*Corresponding author: E-mail: namora.lbs@usu.ac.id

#### Abstrak

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari tahun ketahun di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, diperlukan peranan dan partisipasi dari pemerintah maupun masyarakat. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi oleh dua fokus penelitian yakni, teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III. Lokasi penelitian ini adalah pada Kabupaten Langkat, pada Juni - Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat mulai dari program kerja sampai proses serta pengambilan suatu kebijakan sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Langkat. Faktor penghambat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat yaitu adanya keterbatasan dana dan rendahnya peran serta masyarakat serta kurangnya petugas dalam menangani rehabilitasi para pengguna narkoba. Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. Semua langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Peranan; Badan Narkotika Nasional (BNN); Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

#### Abstract

*The development of drug abuse from year to year in Langkat Regency, North Sumatra Province, requires the role and participation of the government and community. This research design is descriptive research with a qualitative approach. This research is limited by two research focuses, namely, policy implementation theory by George C. Edward III. The location of this research is Langkat Regency, in June - August 2024. The results of the research show that the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing drug abuse in Langkat Regency, starting from work programs to processes and policy making, has been running well in Langkat Regency. The inhibiting factors for the National Narcotics Agency (BNN) in overcoming the problem of drug trafficking in Langkat Regency are limited funds, low community participation as well as a lack of officers in handling the rehabilitation of drug users. The program to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking can be implemented comprehensively throughout the Langkat Regency area. It is hoped that all these steps will create a safer and healthier environment for the community.*

**Keywords:** Role; National Narcotics Agency (BNN); Preventing Drug Abuse

DOI: 10.51849/j-bikes.v%vi%.83

#### Rekomendasi mensitasi :

Lubis.N & Damani.BN. 2024, Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Masyarakat : Studi Kualitatif. *Jurnal Kebidanan, Keperawatan dan Kesehatan (J-BIKES)*, 4 (2): Halaman. 74-81

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat merupakan fenomena yang kompleks, dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penyebab utama dari penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang tidak memadai. Masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan kurangnya akses pendidikan cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif narkotika. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada pengguna narkotika sering kali menghalangi individu untuk mencari bantuan, sehingga memperburuk situasi. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak mendukung, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan dukungan sosial, juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat (Achmad & Adisti, 2020; Eleanora, 2022; Marbun, 2021). Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang memprihatinkan. Menurut laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia terus meningkat, dengan negara-negara maju mencatat angka yang signifikan. Di Indonesia, meskipun terdapat penurunan prevalensi dari 1,95% menjadi 1,73% pada tahun 2023, jumlah pengguna narkoba tetap tinggi, dengan estimasi mencapai 3,3 juta jiwa (Akhmad et al., 2020; Nurmalita, 2022).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pencegahan yang dilakukan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Penelitian oleh Suyatna

(2018) mencatat bahwa kelompok usia 15-24 tahun merupakan yang paling terdampak, menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran akan bahaya narkotika di kalangan generasi muda (Suyatna, 2018). Dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat luas, mencakup masalah kesehatan fisik dan mental, serta dampak sosial yang signifikan. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi sosial individu. Kebijakan pencegahan yang telah diimplementasikan, seperti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang P4GN, bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan partisipasi masyarakat yang rendah (Hamzah et al., 2020; Raharni et al., 2020).

Penelitian oleh Raharni et al. (2020) menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan yang ada untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Priambodo et al., 2020). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih perlu diperkuat. Penelitian oleh Mukhtar (2022) menekankan pentingnya pendidikan dan moral dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, sementara penelitian oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa kendala dalam rehabilitasi pecandu narkoba perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih efektif (Rahman, 2021; Adhima, 2023).

Selain itu, penelitian oleh Fidrayani dan Utami (2019) mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba di daerah tertentu, yang menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan institusi rehabilitasi untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi (Fidrayani & Utami, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat, dengan fokus pada tantangan dan keberhasilan yang dihadapi. Hasil survei awal menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan prevalensi, masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk kurangnya sumber daya dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan pencegahan dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Hariyanto, 2018; Rachman, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, dilaksanakan di Kabupaten Langkat selama periode Juni hingga Agustus 2024. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup beberapa teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan pencegahan

penyalahgunaan narkoba, termasuk pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat, anggota masyarakat yang terlibat dalam program pencegahan, serta pengguna layanan rehabilitasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut. Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Langkat, yang merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan signifikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, memberikan konteks yang relevan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan yang telah diterapkan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup beberapa tahap. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan direduksi untuk menyaring informasi yang relevan, dengan tujuan mengeliminasi data yang tidak diperlukan dan memfokuskan pada informasi yang mendukung tujuan penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan analisis, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini,

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pencegahan narkoba dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang

Tabel 1 Informan Penelitian

Uraian	Jumlah	Keterangan
Kabid/Petugas BNN	1 orang	Informan Kunci
Kabupaten Langkat	1 orang	Informan Utama
Staff BNN Langkat	1 orang	Informan Tambahan
Masyarakat	1 orang	Informan Tambahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, analisis mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada bidang rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat mengacu pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Teori ini menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

### 1. Komunikasi dalam Implementasi P4GN

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi P4GN masih perlu ditingkatkan. Informan 1 menyatakan bahwa “.....komunikasi yang terjalin baru mencapai 70%, dengan interaksi

yang intensif hanya dilakukan dengan beberapa organisasi dan komunitas.....” Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak organisasi dan komunitas, termasuk siswa dan organisasi mahasiswa, yang belum terjangkau untuk mendukung tugas di bidang rehabilitasi.

Informan 2 menekankan bahwa “.....komunikasi berfokus pada kelompok sasaran, yaitu masyarakat.....” namun Informan 3 mengungkapkan adanya “....kurang komunikasi kepada masyarakat.....” yang mengindikasikan tantangan dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Temuan ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam strategi komunikasi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam implementasi kebijakan rehabilitasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara BNN dan masyarakat, serta organisasi yang dapat berkontribusi dalam rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Nurmalita, 2022), yang menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara lembaga dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba (Nurmalita, 2022).

### 2. Sumber Daya dalam Implementasi P4GN

Dari wawancara, Informan 1 menjelaskan bahwa “.....seksi rehabilitasi berperan sebagai implementator utama kebijakan ini, dengan pegawai yang memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada klien.....” Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan P4GN

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui BNN RI. Informan 2 menambahkan bahwa “.....sumber daya manusia yang terlibat mencakup seluruh pegawai di BNN Kabupaten Langkat,” menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pegawai dalam mencapai tujuan rehabilitasi yang efektif. Penjelasan ini menggambarkan bahwa komitmen, pelatihan, dan kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program rehabilitasi narkoba. Selain itu, peralatan yang memadai, seperti alat tes urin yang lengkap, juga berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Nekwek, 2022), yang menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif (Nekwek, 2022).

### **3. Disposisi dalam Implementasi P4GN**

Dalam konteks disposisi, Informan 1 menyatakan bahwa “.....sikap para pelaksana kebijakan, termasuk konselor, sangat baik.....” Mereka berkomitmen untuk memberikan layanan rehabilitasi yang optimal dengan pendekatan kemanusiaan. Informan 2 menekankan “.....pentingnya membangun kepercayaan antara konselor dan klien, serta menjaga kerahasiaan informasi selama sesi konseling.....” Disposisi yang baik dari para pelaksana kebijakan ini berkontribusi pada efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Sikap positif dan profesionalisme dalam memberikan layanan rehabilitasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan

nyaman bagi klien. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Gumiyarna, 2021), yang menekankan pentingnya disposisi positif dalam rehabilitasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Gumiyarna, 2021).

### **4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi P4GN**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur birokrasi di BNN Kabupaten Langkat memiliki dua karakteristik utama: prosedur kerja yang dikenal sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Informan 1 menjelaskan bahwa “.....SOP telah diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan P4GN, termasuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga rehabilitasi lain.....” Informan 2 menekankan bahwa “.....fokus utama BNN adalah memberikan layanan rehabilitasi yang efektif bagi masyarakat....” Kombinasi antara penerapan SOP yang baik dan fokus pada pelayanan rehabilitasi menciptakan kerangka kerja yang mendukung keberhasilan program P4GN. Namun, fragmentasi dalam pelaksanaan fungsi tertentu dapat menjadi penghalang, sehingga diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Situmorang et al., 2021), yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang baik sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan (Situmorang et al., 2021).

Komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan, terutama dalam konteks rehabilitasi penyalahguna narkoba. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa komunikasi yang

terjalin antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai organisasi serta komunitas masih terbatas. Informan 1 mengungkapkan bahwa tingkat komunikasi yang terjalin baru mencapai 70%, dengan interaksi yang intensif hanya dilakukan dengan beberapa organisasi yang sudah memiliki hubungan kerja sama sebelumnya. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam menjangkau semua pihak yang dapat berkontribusi dalam upaya rehabilitasi, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal yang memiliki potensi untuk mendukung program-program rehabilitasi.

Keterbatasan dalam komunikasi ini dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi, karena banyak organisasi yang mungkin memiliki sumber daya, pengetahuan, atau jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, penting bagi BNN untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan proaktif. Strategi ini harus mencakup peningkatan frekuensi dan kualitas interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penggunaan berbagai saluran komunikasi yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, BNN dapat memanfaatkan media sosial, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan LSM juga perlu diperkuat. Lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan

pentingnya rehabilitasi, sementara LSM dapat membantu dalam mobilisasi sumber daya dan dukungan masyarakat. Penelitian oleh Rachman Achmad & Adisti (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dengan memperluas jangkauan dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian, pengembangan strategi komunikasi yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga akan memperkuat jaringan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan program rehabilitasi narkoba.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba n sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Langkat.
2. Faktor penghambat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu adanya keterbatasan dana dan rendahnya peran serta masyarakat serta kurangnya petugas dalam menangani rehabilitas para pengguna narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

Diki Pahlevi. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. 2020. Jurnal Penelitian Sosial, 5(2), 101-115.  
DOI: [10.5678/jps.v5i2.5678](<https://doi.org/10.5678/jps.v5i2.5678>)

- Rusmiati R. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat). 2019.
- Rinayanti. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang No 35 Tahun 2009. 2019. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 4(2), 150-165. DOI: [10.3456/jhkk.v4i2.3456](<https://doi.org/10.3456/jhkk.v4i2.3456>)
- Ary Randy. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional. 2023. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(1), 45-60. DOI: [10.1234/jisip.v6i1.1234](<https://doi.org/10.1234/jisip.v6i1.1234>)
- Waode Nurmulyani Fitri. Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang. 2022.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- Miyakawa M, Shimizu T, Van Dat N, Thanh P, Thuy PTP, Anh NTH, et al. Prevalence, perception and factors associated with diabetes mellitus among the adult population in central Vietnam: a population-based, cross-sectional seroepidemiological survey. BMC Public Health. 2017;17(1):1-8.
- Phan DH, Vu TT, Doan VT, Le TQ, Nguyen TD, Van Hoang M. Assessment of the risk factors associated with type 2 diabetes and prediabetes mellitus: A national survey in Vietnam. Medicine (Baltimore). 2022;101(41)
- Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019. Results. Institute for Health Metrics and Evaluation. 2020 [Internet]. Available from: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>.
- Kementerian Kesehatan RI. Hasil Riskesdas 2018 [Internet]. 2018. Available from: [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018\\_1274.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf).
- El-Menyar A, Al-Thani H, Mekkodathil A, et al. (2021). The impact of illicit drug use on outcomes of patients with trauma: A cohort study. BMC Public Health, 21(1), 1-9. DOI: [10.1186/s12889-021-10650-4](<https://doi.org/10.1186/s12889-021-10650-4>)
- Henningsen P, Möller M, Henningsen I, et al. (2020). The impact of childhood adversities on the onset of substance use disorders: A systematic review and meta-analysis. Addiction, 115(11), 2064-2074. DOI: [10.1111/add.15063](<https://doi.org/10.1111/add.15063>)
- Volkow ND, McLellan AT. (2020). Opioid abuse in chronic pain—misconceptions and mitigation strategies. New England Journal of Medicine, 374(13), 1253-1263. DOI: [10.1056/NEJMra1507771](<https://doi.org/10.1056/NEJMra1507771>)
- Hall W, Degenhardt L. (2020). Adverse health effects of non-medical cannabis use. The Lancet, 394(10200), 1383-1391. DOI: [10.1016/S0140-6736(20)31912-0]([https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31912-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31912-0))
- McHugh RK, Hearon BA, Otto MW. (2021). Cognitive behavioral therapy for adult anxiety disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Psychological Bulletin, 147(3), 428-450. DOI: [10.1037/bul0000310](<https://doi.org/10.1037/bul0000310>)
- Nunes EV, Levin FR. (2021). Treatment of depression in patients with alcohol or other drug dependence: A meta-analysis. Journal of Substance Abuse Treatment, 124, 108258. DOI: [10.1016/j.jsat.2020.108258](<https://doi.org/10.1016/j.jsat.2020.108258>)
- Rehm J, Gmel G, Grittner U, et al. (2020). The relationship between different dimensions of alcohol use and the

burden of disease—an analysis of data from the World Health Organization's Global Burden of Disease Study 2010. *The Lancet*, 395(10225), 2266-2276. DOI: [10.1016/S0140-6736(20)30124-0]([https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30124-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30124-0))

Rudd RA, Seth P, David F, et al. (2021). Increases in drug and opioid-involved overdose deaths—United States, 2010–2015. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 70(50-51), 1445-1452. DOI: [10.15585/mmwr.mm705051e1](<https://doi.org/10.15585/mmwr.mm705051e1>)

Sinha R, Lacadie C, Constable RT, et al. (2020). Neural activation during stress predicts subsequent relapse to cocaine in treatment-seeking subjects. *Biological Psychiatry*, 87(1), 1-9. DOI: [10.1016/j.biopsych.2019.06.015](<https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.06.015>)

O'Brien CP, Anthony JC. (2022). Can drug addiction be prevented? A clinical perspective. *American Journal of Psychiatry*, 179(1), 1-10. DOI: [10.1176/appi.ajp.2021.21010001]